

**ANALISIS EKONOMI KEBIJAKAN DANA DESA DI BIDANG
PEMBANGUNAN DESA DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TERHADAP
KEMISKINAN DESA DI KABUPATEN SIDOARJO**

**Moch Fajar Aris M¹
Marseto², Sishadiyati³**

Email: mochamad.fajar.aris@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Sesuai dengan APBN TA 2018, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa TA 2018 yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mementaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Secara umum Dana Desa dapat digunakan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah, bidang Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa Bidang Pembangunan Desa, Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kemiskinan Desa Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 – 2020. Sampel data yang digunakan dengan mengambil secara random 54 desa di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi data panel. Berdasarkan metode pengujian yang digunakan, bahwa model terbaik yang digunakan adalah *Random Effect Model (REM)*. Dengan tingkat signifikansi setiap uji statistic yaitu 5%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan semua variable independent berpengaruh terhadap variable dependen. Sedangkan, secara parsial ADD, DD Bidang Pembangunan Desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan DD Bidang Pemberdayaan Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan.

Kata Kunci : Kemiskinan, Alokasi Dana Desa, Dana Desa Bidang Pembangunan Desa, Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu kondisi, dimana tiap individu mengalami kurang lebihnya sumber daya dan pendapatan yang berkelanjutan. Menurut Irfan dan Laily (2017) dengan melihat dari kondisi masyarakat Indonesia yang terperangkap akan kemiskinan dan ketidakberdayaan dalam hidup, maka diperlukan perwujudan untuk mensejahterakan masyarakat melalui upaya penanggulangan untuk mengatasi kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat.

Menurut Suharto (2010), adapun penyebab kemiskinan paling tidak ada empat penyebab terjadinya kemiskinan. Pertama, faktor individual, di mana seseorang menjadi miskin karena faktor pribadinya, seperti cacat permanen yang menyebabkan ia menjadi miskin. Kedua, faktor sosial, di mana kemiskinan terjadi akibat diskriminasi sosial yang dilakukan. Ketiga, faktor kultural, di mana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya., seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Keempat, faktor struktural, di mana kemiskinan terjadi akibat ketidakadilan sistem ekonomi, orang menjadi miskin akibat di miskinkan oleh sistem yang ada. Program pengentasan kemiskinan yang telah banyak dilakukan oleh pemerintah seperti; Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Sejahtera (Rastra), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Usaha Bersama (KUBE), Raskin, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dll. Namun program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah belum memberikan implikasi yang cukup signifikan (Arif, 2010).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, membuat kedudukan desa semakin baik dan mampu mandiri untuk memajukan daerah masing-masing, namun yang terjadi sebaliknya. Undang-undang tersebut mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan asset desa. Pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pendapatan desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Pendapatan desa yang dimaksud adalah dana desa.

Menurut (peraturan Pemerintah, 2005) Republik Indonesia No 72 Tentang Desa Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah untuk mewujudkan daerah otonom memerlukan peran serta aktif masyarakat setempat dalam setiap langkah pembangunan.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif Hartono (2011:85) menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang analisisnya lebih fokus pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan menggunakan metode statistika.

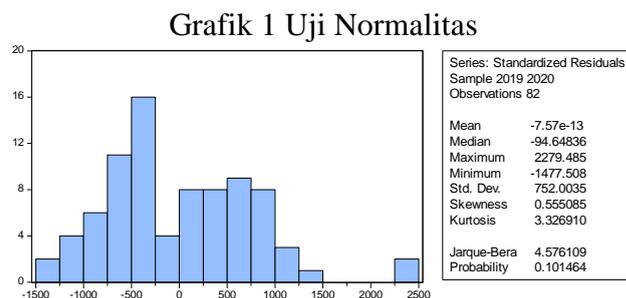
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan pemerintah desa dalam menggunakan dana desa, dimana analisa yang dilakukan dengan meneliti apakah ada variabel alokasi dana desa, dana desa bidang pembangunan desa, dana desa bidang pemberdayaan masyarakat terhadap Kemiskinan desa di Kab. Sidoarjo tahun 2019 – 2020. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis regresi linier berganda dengan metode data panel

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Model

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Sumber : Output Eviews 9

Pada uji normalitas tersebut dapat menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0.101464 > 0.05$, sehingga dapat diartikan tidak adanya gejala normalitas pada model regresi tersebut.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 1.1 Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1	0.5344537572585891	0.0816693705015691
X2	0.5344537572585891	1	-0.2314444628705253
X3	0.0816693705015691	-0.2314444628705253	1

Sumber : Output Eviews 9

Berdasarkan pengujian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat variable, tidak terdapat nilai lebih dari 0,8. Dapat diartikan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada model regresi tersebut.

c. Uji Heterokedastisitas

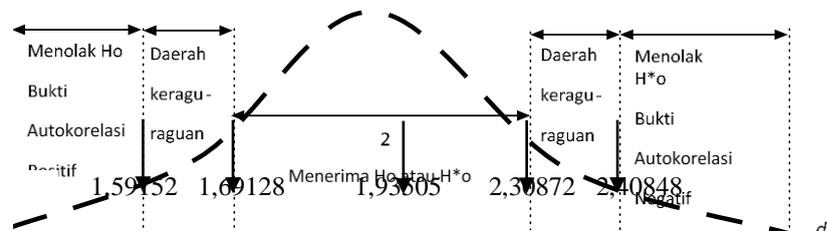
Tabel 1.2 Hasil Uji Heterokedastisitas

	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Sumber : Output Eview s 9	C	660.8820	337.6569	1.957259	0.0539
	X1	-0.000528	0.000474	-1.113940	0.2687
	X2	0.000443	0.000324	1.366459	0.1757
	X3	0.000506	0.000535	0.945814	0.3472

Kesimpulan yang diambil dari uji diatas dilihat dari nilai probabilitasnya pada setiap variable, dan keempat variable terlihat nilai probabilitasnya diatas nila signifikasi yaitu 0.05. maka hipotesis untuk H_0 diterima dan H_1 ditolak yang mengartikan tidak adanya gejala heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Gambar 1.1 Kurva Durbin-Watson



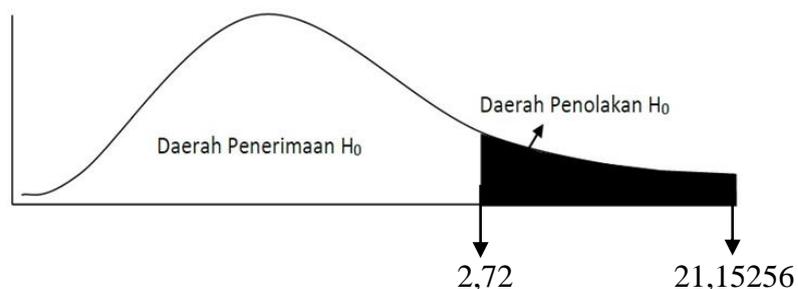
Berdasarkan hasil perhitungan $D_{urbin-watson}$, dimana posisi DW berada diantara d_u dan $(4-d_u)$. Sehingga dapat diartikan model ini tidak terjadi autokorelasi karena nilai DW berada pada daerah tidak ada korelasi.

Berdasarkan hasil uji Asumsi klasik, dapat ditarik kesimpulan bahwa model penelitian ini tidak terjadi gejala asumsi klasik, dan dapat dilanjutkan dengan melakukan pengujian selanjutnya.

2. Uji Hipotesis

a. Uji F (Simultant)

Gambar 2.1 Kurva Distribusi Uji F



Berdasarkan kurva diatas, bahwa nilai F_{hitung} sebesar 21,15256 dan nilai F_{table} sebesar 2,72 maka $F_{hitung} 21,15256 > F_{table} 2,72$ dan nilai probabilitasnya $0,0000 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 Diterima, sehingga adanya pengaruh signifikan antar variable independent yaitu Alokasi Dana Desa, Dana Desa Bidang Pembangunan Desa, Dana Desa Pemberdayaan Masyarakat terhadap variable dependen yaitu Kemiskinan Desa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019-2020.

b. Uji T (Parsial)

Tabel 2.1 Output Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2596.352	554.6205	-4.681312	0.0000
X1	0.003108	0.000793	3.918911	0.0002
X2	0.001365	0.000540	2.525782	0.0136
X3	0.001579	0.000868	1.819085	0.0727

Sumber : Output Eviews 9

1. Pengaruh secara parsial antara Alokasi Dana Desa (X1) terhadap Kemiskinan (Y), Berdasarkan pengujian, menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 3,918911 dan t_{table} 1,99085, maka $t_{hitung} 3,918911 > t_{table}$ dan nilai probabilitasnya menunjukkan $0,0002 < 0,05$. sehingga dapat diartikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variable Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan secara parsial.
2. Pengaruh secara parsial antara Dana Desa Bidang Pembangunan Desa (X2) terhadap Kemiskinan (Y), Berdasarkan pengujian, menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 2,525782 dan t_{table} 1,99085, maka $t_{hitung} 2,525782 > t_{table}$ dan nilai probabilitasnya menunjukkan $0,0136 < 0,05$. sehingga dapat diartikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variable Dana Desa Bidang Pembangunan Desa terhadap Kemiskinan secara parsial.
3. Pengaruh secara parsial antara Dana Desa Bidang Pembangunan Desa (X2) terhadap Kemiskinan (Y), Berdasarkan pengujian diatas, menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 1,819085 dan t_{table} 1,99085, maka $t_{hitung} 1,819085 < t_{table}$ dan nilai probabilitasnya menunjukkan $0,0727 > 0,05$. sehingga dapat diartikan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variable Dana Desa Bidang Pembangunan Desa terhadap Kemiskinan secara parsial.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 2.2 Hasil R^2

Variable Dependen	Variabel Independen	R^2
Kemiskinan (Y)	Alokasi Dana Desa (X1)	0,448598 (44,8598 %)
	Dana Desa Bid. Pembangunan Desa (X2)	
	Dana Desa Bid. Pemberdayaan Masyarakat (X3)	

Sumber : Output Eviews 9

Koefisien determinasi dari variable independent yakni Alokasi Dana Desa (X1), Dana Desa Bidang Pembangunan Desa (X2), Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat (X3) memilikin pengaruh terhadap Kemiskinan (Y) dapat dilihat pada table 4.15 yakni Koefisien Determinasi sebesar 0,448598 berarti 44,8598 % dari seluruh pengamatan menyatakan variable independent memiliki pengaruh terhadap variable dependen. Sedangkan 0,551402 dipengaruhi oleh variable lain.

B. Pembahasan

1. Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan

Dalam penelitian ini khususnya di Kabupaten Sidoarjo pengaruh dari Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh yang signifikan kearah positif, dimana setiap penambahan Alokasi Dana Desa akan menaikkan kemungkinan tingkat kemiskinan, Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Susilowati, 2017). Tetapi cara ini masih dikatakan kurang efektif dalam arti dampak yang diberikan terhadap penurunan angka kemiskinan, karena secara oprasional kewenangan ini menyangkut pemerintah daerah dimana bertanggung jawab dan lebih mampu mengerti dan memahami akan kebutuhan serta potensi masyarakat pada desa yang bersangkutan. Sehingga danan desa diberikan pada pemerintah desa untuk dikelola menjadi wujud dari desentralisasi fiscal. Karena Dana Desa menjadi kucuran wajib Pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran tersebut pada APBN dan dittransfer melalui APBD. Ditahun 2020 juga berdampak dengan adanya pandemic Covid-19 Kementrian Desa PDTT telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 mengatur penggunaan dana desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemic Covid-19. Dimana pemerintah meprioritaskan pengalokasian dana desa untuk 2 hal yaitu : pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan system Padat Karya Tunai Desa untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat dan yang kedua penguatan kjesehatan masyarakat melalui pencegahan dan penanganan Covid-19.

2. Analisis Pengaruh Dana Desa Bidang Pembangunan Desa terhadap Kemiskinan

Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa merupakan stimulus Dana desa yang digunakan untuk membiayai program atau kegiatan yang terkait dalam

pembangunan Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, dll. Dengan pembangunan infrastruktur menjadikan salah satu cara dalam menanggulangi kemiskinan. (Friawan dan Wibowo, 2014) menjelaskan infrastruktur sangat penting dalam integrasi ekonomi yaitu : pertama, ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pemicu pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi. Ketiga, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar daerah. Meningkatnya kondisi infrastruktur akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh fasilitas pelayanan pokok yang utama baik Pendidikan, Kesehatan dan social.

3. Analisis Pengaruh Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kemiskinan

Dalam penelitian ini variable dana desa bidang pemberdayaan masyarakat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan sejalan dengan penelitian (Desy Mediana, 2019) suatu desa memiliki angka kemiskinan yang tinggi akan meningkat ketika penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa tinggi. Karenanya di Kabupaten Sidoarjo dana desa dibidang ini masih sedikit dilakukan pemerintah – pemerintah desa dalam memaksimalkan penggunaan guna mengentas kemiskinan di desa. Pemberdayaan masyarakat desa dapat direalisasikan dengan kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas masyarakat dalam berwirausaha sehingga adanya pemerataan peningkatan ekonomi individu. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakanya pelatihan ketrampilan guna meningkatkan kualitas masyarakat desa sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan memberikan akses dan pengembangan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mampu menghasilkan produk guna meningkatkan daya dukung desa mengurangi kemiskinan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yang telah dijabarkan pada bab hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa alokasi dana desa dan dana desa bidang pembangunan desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan desa di kab. Sidoarjo, dan pengujian secara bersama dari ketiga variabel menjelaskan bahwa pengaruh pengaruhnya sebesar 44,8% dan sisanya dipengaruhi variabel lain. Dengan hasil tersebut menegaskan bahwa dana desa dapat menjadi salah satu instrumen menurunkan angka kemiskinan. Dari kesimpulan ini dapat diambil saran untuk pemerintah agar dana stimulant yang telah dialokasikan mampu dimaksimalkan dalam menurunkan angka kemiskinan. Langkah yang bisa dilakukan, dimana di Sidoarjo banyak desa-desa telah memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk dijadikan investasi, yakni seperti tempat swa foto yang menjadikan fokus pada objek wisata.

DAFTAR RUJUKAN

A Saibani, (2014). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Media Pustaka

Jurnal Randai

- Adisasmita, Rahardjo, (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Ari Kunto, Suharsimi, (2014) *Pengelolaan Sebagai Sebuah Pendekatan Evaluatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik, *Jumlah Keluarga Miskin kabupaten Sidoarjo 2021* (Online) tersedia di: www.bps.go.id. (5 Maret 2021), Pukul 15.07 WIB
- Hefrizal, Hendra, et. al. *Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan*, Kompas: Februari 2017
- Irfan Syauqi, Laily Dwi Arsyianti, (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
- Jaenal Efendi, (2015). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Disertasi Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Muliyani Indrawati, Sri, (2017). *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta: Kemenkeu
- Nilam Indah Susilowati, Dwi Susilowati, Samsul Hadi, *Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Belanja Modal dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vo; 1 Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.